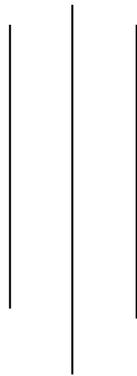




# **LAPORAN KINERJA ( LK )**

**DINAS KETENAGAKERJAAN DAN KOPERASI UKM  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA  
TAHUN 2018**



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA  
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN KOPERASI UKM  
JLN. LINTAS LANGGA PAYUNG-GUNUNGTUA KM.5 GUNUNGTUA 22753**

## **KATA PENGANTAR**

Pengukuran keberhasilan maupun kegagalan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit dilakukan secara objektif. Kesulitan itu antara lain karena pengukuran tingkat kinerja suatu OPD lebih ditekankan kepada kemampuan OPD tersebut menyerap anggaran, dengan kata lain OPD yang dapat menyerap semua anggaran yang ada di DPA-SKPD, akan dinyatakan berhasil sekalipun hasil dan dampak yang dicapai masih di bawah standar.

Untuk dapat menilai keberhasilan suatu OPD, maka seluruh aktivitas OPD tersebut harus dapat diukur mulai dari input, output, hasil, manfaat dan dampak dari program yang dilaksanakan.

Sehubungan dengan itu, dengan berpedoman pada Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM Kabupaten Padang Lawas Utara menyusun Laporan Kinerja (LK) sebagai media informasi tentang pelaksanaan program/kegiatan tahun 2018. Manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya LK ini antara lain meningkatkan akuntabilitas, sebagai umpan balik untuk melakukan perbaikan dan peningkatan secara terus menerus dan berkesinambungan, mendorong untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan menjadikan OPD yang akuntabel.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja yang kami susun ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu dengan segala kerendahan hati kami mengharapkan saran dan pendapat dari semua pihak untuk perbaikan pada tahun mendatang.

**KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN  
DAN KOPERASI UKM  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,**

**SITI AWAN,SH.,M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19630109 198303 2 003**

# DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
1.3 Susunan Organisasi.....	3
1.4 Sistematika Penyajian.....	3
BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA.....	5
2.1 Visi dan Misi.....	5
2.2 Tujuan dan Sasaran.....	6
2.3 Program dan kegiatan.....	7
2.4 Indikator Kinerja Utama.....	9
2.5 Perjanjian Kinerja.....	10
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA.....	11
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	11
3.2 Realisasi Anggaran.....	20
BAB IV : PENUTUP.....	23

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Padang Lawas Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor : 8 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara, yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Padang Lawas Utara, Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya wajib membuat perencanaan program kegiatan yang strategic, sinergi, terukur, dan tepat sasaran serta untuk melaksanakannya memperoleh anggaran dari APBD. Anggaran dimaksud wajib dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta dilakukan evaluasi tingkat capaian kinerjanya serta menginventarisir masalah-masalah yang dihadapi.

Dalam rangka melakukan evaluasi tingkat capaian kinerja dimaksud, Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, Inpres ini dilengkapi dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam RPJMD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2013-2018 pada misi ke-lima **“Membangun ekonomi kerakyatan melalui peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja dan kelembagaan ekonomi kreatif serta penumbuhan kesempatan kerja dan berusaha”**, bermakna bahwa untuk penanggulangan

pengangguran dan pengentasan kemiskinan, maka arah kebijakan pembangunan ke depan diarahkan kepada meningkatkan penanaman modal dengan peningkatan promosi potensi pengembangan industry pengolahan bahan baku hasil-hasil pertanian, perkebunan, dan pertambangan, peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja melalui penciptaan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif, peningkatan keahlian dan keterampilan tenaga kerja secara intensif dan berkesinambungan, optimalisasi pemberian Pendidikan dan Pelatihan Teknis kepada angkatan kerja agar dapat bersaing memasuki lapangan kerja, pengembangan Koperasi dan UMKM, optimalisasi pemanfaatan teknologi pengelolaan usaha ekonomi kerakyatan, penciptaan lapangan kerja baru melalui pengembangan industry kecil/menengah, pengembangan sentra-sentra perdagangan, dan pengembangan pariwisata.

Untuk pencapaian misi tersebut di atas, ada beberapa strategi sebagai langkah-langkah yang akan ditempuh dan arah kebijakan yang merupakan pedoman untuk memastikan rumusan strategi tetap terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan selama kurun masa periode 2014-2018. Dari beberapa strategi dan arah kebijakan dimaksud yang menyentuh kepada tugas pokok dan fungsi urusan pemerintahan bidang Ketenagakerjaan, Koperasi dan UKM, antara lain adalah :

Strategi 1 : Menggerakkan sentra-sentra ekonomi kerakyatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).dan arah kebijakan dilaksanakan melalui :

- Menumbuhkembangkan sistem ekonomi kerakyatan UMKM dan perluasan kemitraan dengan usaha ekonomi skala besar;
- Pengembangan kapasitas lembaga koperasi dan anggota koperasi;
- Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan untuk pengembangan ekonomi kreatif;
- Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil.

Strategi 2 : Meningkatkan kapasitas dan produktivitas tenaga kerja.dan arah kebijakan dilaksanakan melalui :

- Peningkatan kreativitas dan produktivitas tenaga kerja;
- Peningkatan jaminan ketenagakerjaan;
- Pengembangan ekonomi kreatif untuk perluasan lapangan kerja.

## 1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor : 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara, yang telah dirubah dengan Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor : 47 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor : 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara, Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM mempunyai Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

### a. Kedudukan

Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan unsur pelaksana daerah di bidang Ketenagakerjaan, Koperasi dan UKM, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### b. Tugas Pokok

Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM Kabupaten Padang Lawas Utara mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Ketenagakerjaan, Koperasi dan UKM berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

### c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM Kabupaten Padang Lawas Utara menyelenggarakan fungsi :

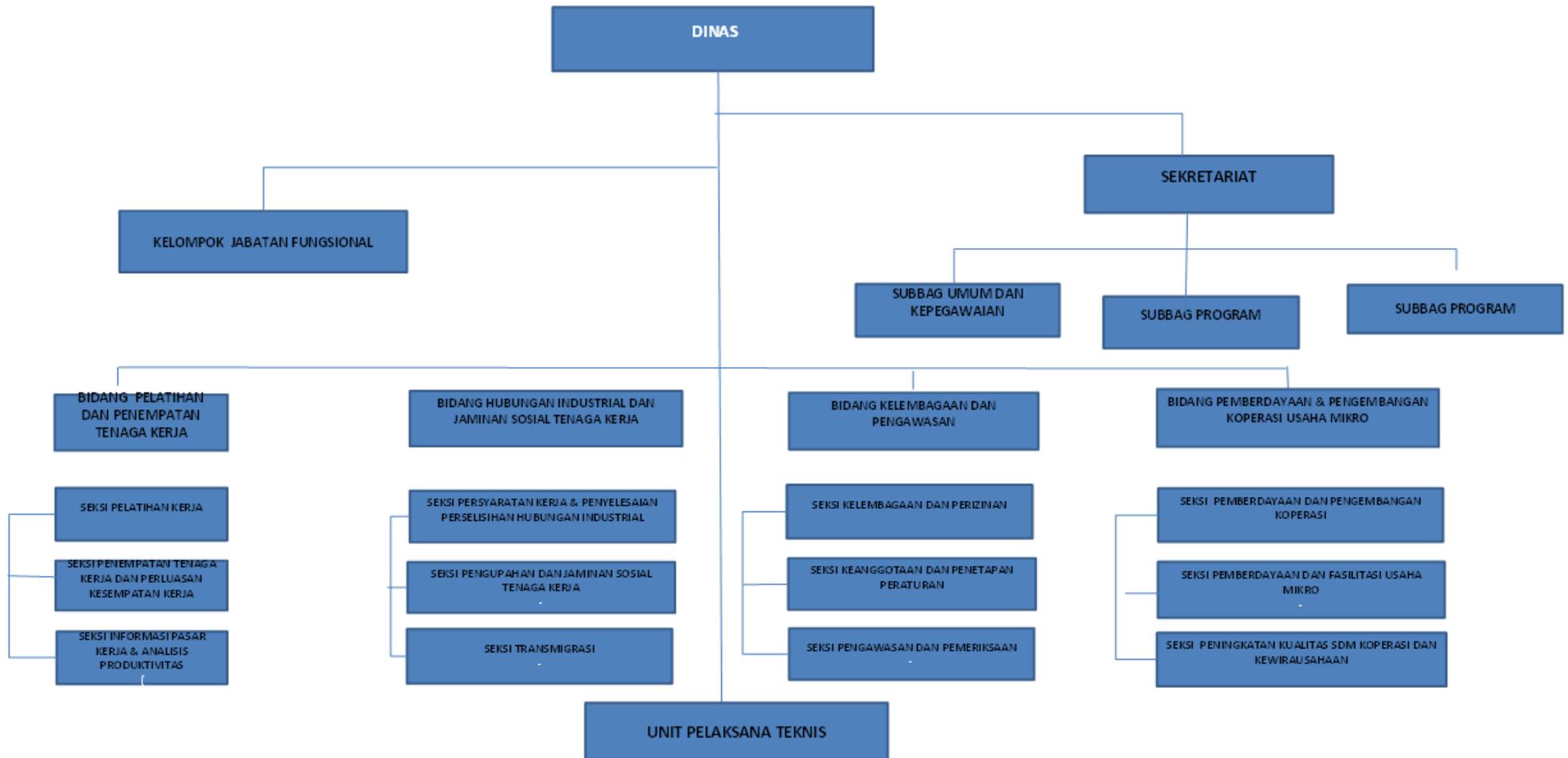
1. Perumusan kebijakan teknis sesuai kewenangan bidang Ketenagakerjaan, Koperasi dan UKM;
2. Pembina dan pelaksana tugas di bidang Ketenagakerjaan, Koperasi dan UKM;
3. Pemberi rekomendasi perijinan sesuai kewenangan bidang Ketenagakerjaan, Koperasi dan UKM;
4. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 1.3 Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM Kabupaten Padang Lawas Utara terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi :
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - Sub Bagian Program
  - Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Pelatih Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja, membawahi :
  - Seksi Pelatihan Kerja
  - Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
  - Seksi Informasi Pasar Kerja dan Analisis Produktivitas
4. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, membawahi :
  - Seksi Persyaratan Kerja dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
  - Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
  - Seksi Transmigrasi
5. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan, membawahi :
  - Seksi Kelembagaan dan Perizinan
  - Seksi Keanggotaan dan Penetapan Peraturan
  - Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan
6. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, membawahi :
  - Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi
  - Seksi Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha Mikro
  - Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan Kewirausahaan
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan struktur organisasi Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Padang Lawas Utara, adalah sebagai berikut :



## **1.4 Sistematika Penyajian**

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini berisi pencapaian kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM Kabupaten Padang Lawas Utara selama tahun 2018. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2018 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) Tahun 2017 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja (LK) Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, tugas pokok dan fungsi, serta susunan organisasi.

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Bab ini berisi visi, misi, tujuan dan sasaran serta diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Bab ini menguraikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja, serta diuraikan juga realisasi anggaran yang dipergunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

### **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Untuk melaksanakan program pembangunan bidang Ketenagakerjaan, Koperasi dan UKM sesuai arah kebijakan pemerintah, maka Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM Kabupaten Padang Lawas Utara mengacu pada “review” Rencana Strategis (RENSTRA) dari Renstra Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2013 – 2018 dan telah menjadi Renstra Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM Kabupaten Padang Lawas Utara.

#### **2.1. VISI DAN MISI**

Visi adalah rumusan umum tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai OPD melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi. Tujuan penetapan visi adalah untuk mencerminkan apa yang ingin dicapai organisasi, memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam organisasi dan menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi. Adapun visi yang tercantum pada Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM Kabupaten Padang Lawas Utara adalah :

**“Terwujudnya Pelayanan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM yang Berdayaguna, Kompeten, Produktif, dan Sejahtera”.**

Untuk mewujudkan visi tersebut, Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM Kabupaten Padang Lawas Utara menetapkan misi yang menggambarkan hal-hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Penciptaan iklim Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM yang kondusif.
2. Pengembangan dan perluasan kesempatan kerja.
3. Pengembangan dan pengawasan sarana dan prasarana pendukung serta peningkatan promosi produk UKM.
4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia baik aparatur Pembina, maupun pencari kerja serta pelaku Koperasi dan UKM.
5. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM.

6. Peningkatan dan pengembangan kerjasama di bidang Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM.
7. Penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG).
8. Menerbitkan Pengesahan dan Rekomendasi Perizinan di bidang Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM.
9. Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
10. Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja.
11. Penempatan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

## 2.2. Tujuan dan Sasaran

### a. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan menangani isu-isu penting yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi. Tujuan Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM Kabupaten Padang Lawas Utara perlu dirumuskan agar dapat diketahui secara tepat apa yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan misinya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Selanjutnya untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan, ditetapkanlah indikator kinerja yang terukur.

Tujuan yang ditetapkan Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM Kabupaten Padang Lawas Utara adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja
2. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pencari kerja melalui kegiatan Pelatihan dan Keterampilan
3. Berkurangnya pengangguran dan bertambahnya perluasan kesempatan kerja
4. Terlaksananya penyebarluasan Informasi Pasar Kerja
5. Terlaksananya identifikasi calon lokasi pemukiman transmigrasi
6. Meningkatnya rasa persatuan dan kesatuan masyarakat eks transmigrasi dengan penduduk sekitar
7. Terlaksananya penyebarluasan informasi tentang Badan Usaha Koperasi
8. Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai praktek perkoperasian yang benar sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi

9. Bertambahnya jumlah koperasi aktif dan sehat
10. Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan UKM di lingkungan masyarakat
11. Memfasilitasi Koperasi dan UKM
12. Meningkatkan kerjasama antara Koperasi dan UKM dengan Pemerintah/Swasta

#### **b. Sasaran**

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara tesrukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM Kabupaten Padang Lawas Utara, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
2. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pencari kerja melalui kegiatan Pelatihan dan Keterampilan
3. Mengurangi pengangguran dan bertambahnya perluasan kesempatan kerja
4. Menyebarkan Informasi Pasar Kerja
5. Mengidentifikasi calon lokasi pemukiman transmigrasi
6. Meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat eks transmigrasi dengan penduduk sekitar melalui kegiatan pembinaan
7. Meningkatkan minat dan perilaku masyarakat untuk berkoperasi (Cooperative-Minded)
8. Meningkatkan pengetahuan/kualitas aparatur Pembina, pelaku Koperasi dan UKM, serta masyarakat/Capacity Building)
9. Meningkatkan minat, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk berwirausaha sendiri

### **2.3. Program dan Kegiatan**

Program/Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2018 adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :
  - 1.1. Penyediaan jasa surat menyurat;
  - 1.2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;

- 1.3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;
- 1.4. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
- 1.5. Penyediaan alat tulis kantor;
- 1.6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- 1.7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
- 1.8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- 1.9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
- 1.10. Penyediaan makanan dan minuman;
- 1.11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah;
- 1.12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
- 1.13. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :
  - 2.1. Pengadaan Meubelair;
  - 2.2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
  - 2.3. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan :
  - 3.1. Pengadaan mesin/kartu absensi;
  - 3.2. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.
4. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan kegiatan :
  - 4.1. Pelatihan berbasis kompetensi Basic Office.
5. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, dengan kegiatan :
  - 5.1. Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi UMKM;
  - 5.2. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan.
6. Program Peningkatan Kesempatan Kerja, dengan kegiatan :
  - 6.1. Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja.
7. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM, dengan kegiatan :
  - 7.1. Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil, dan industri menengah;
  - 7.2. Penyelenggaraan promosi produk UMKM.
8. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, dengan kegiatan
  - 8.1. Penetapan UMKab. Padang Lawas Utara Tahun;

- 8.2. Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan.
9. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, dengan kegiatan :
- 9.1. Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian;
- 9.2. Pendataan Koperasi dan UMKM;
- 9.3. Peringatan Hari Koperasi
10. Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, dengan kegiatan :
- 10.1. Pengembangan keanggotaan koperasi melalui peningkatan penyuluhan dalam rangka GAMASKOP.

#### 2.4. Indikator Kinerja Utama

Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 1 : INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KETENAGAKERJAAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2018

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Kualitas dan produktivitas tenaga kerja	1. Adanya UPTD BLK; 2. Jumlah pencari kerja yang dilatih.
2	Penempatan Tenaga Kerja	1. Jumlah pencari kerja yang terdaftar; 2. Jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan.
3	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)
4	Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	1. Penetapan Upah Minimum Kabupaten Padang Lawas Utara; 2. Jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta Program BPJS; 3. Jumlah Lembaga Ketenagakerjaan Swasta.
5	Pembinaan warga eks transmigrasi	Jumlah warga eks transmigrasi yang mengikuti pembinaan
6	Penguatan Kelembagaan Koperasi	Pertumbuhan Koperasi yang sehat
7	Fasilitasi sarana dan prasarana KUKM	Jumlah sarana dan prasarana KUKM yang diserahkan
8	Kualitas SDM pengelola/ pelaku KUKM	Jumlah SDM pengelola/pelaku KUKM yang kompeten
9	Peningkatan pemasaran dan pengembangan produk KUKM	Ketersediaan Data dan Informasi Produk KUKM
10	Kualitas SDM aparatur Pembina Ketenagakerjaan dan KUKM	Jumlah SDM aparatur Pembina Ketenagakerjaan dan KUKM yang kompeten

## 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

**PERJANJIAN KINERJA  
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN KOPERASI  
USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA  
TAHUN 2018**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1. Adanya UPTD BLK	Terbentuknya UPTD BLK
		2. Jumlah pencari kerja yang dilatih	20 orang
2	Penempatan Tenaga Kerja	1. Jumlah pencari kerja yg terdaftar	250 orang
		2. Jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	80%
3	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	10 kasus
4	Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	1. Penetapan UMKab. Tahun 2019	1 kegiatan
		2. Jumlah pekerja/buruh yg menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan	85%
		3. Jumlah Lembaga Ketenagakerjaan Swasta	2 lembaga
5	Pembinaan Warga eks Transmigrasi	Jumlah warga eks Transmigrasi yang mengikuti pembinaan	80 orang
6	Penguatan Lembaga Koperasi	Pertumbuhan Koperasi yang sehat	40 koperasi
7	Fasilitasi sarana dan prasarana KUKM	Jumlah bantuan sarana dan prasarana KUKM yang diserahkan	25%
8	Kualitas SDM pengelola / pelaku KUKM yg kompeten	Jumlah SDM pengelola/pelaku KUKM yang kompeten	50%
9	Peningkatan pemasaran dan pengembangan produk KUKM	Ketersediaan data dan informasi produk KUKM	50%
10	Kualitas SDM aparatur Ketenagakerjaan dan KUKM yg kompeten	Jumlah SDM aparatur Ketenagakerjaan dan KUKM yang kompeten	70%

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Laporan Kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Padang Lawas Utara ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Lawas Utara.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran. Metode perbandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Padang Lawas Utara pada tahun 2018. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang yang bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Padang Lawas Utara dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

#### **1.1. Capaian Kinerja Organisasi**

##### **a. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2018**

Pada tahun anggaran 2018, Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Padang Lawas Utara telah menetapkan 10 (sepuluh) sasaran yang akan dicapai. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja diuraikan pada Tabel di bawah ini :

Tabel 2 : CAPAIAN KINERJA DINAS KETENAGAKERJAAN DAN KOPERASI  
UKM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA  
TAHUN 2018

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET THN 2018	REALISASI THN 2018
1	Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	3. Adanya UPTD BLK	Terbentuknya UPTD BLK	Blm terealisasi (0,00%)
		4. Jumlah pencari kerja yang dilatih	20 orang	40 orang (200,00%)
2	Penempatan Tenaga Kerja	3. Jumlah pencari kerja yg terdaftar	250 orang	206 orang (82,40%)
		4. Jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	80%	16 orang (7,77%) yg melapor telah ditempatkan
3	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	10 kasus	4 kasus (40,00%)
4	Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	4. Penetapan UMKab. Tahun 2019	1 kegiatan	1 kegiatan (100,00%)
		5. Jumlah pekerja/buruh yg menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan	85%	85% (jumlah pekerja telah menjadi peserta BPJS)
		6. Jumlah Lembaga Ketenagakerjaan Swasta	2 lembaga	2 lembaga (100,00%)
5	Pembinaan Warga eks Transmigrasi	Jumlah warga eks Transmigrasi yang mengikuti pembinaan	80 orang	50 orang (62,50%)
6	Penguatan Lembaga Koperasi	Pertumbuhan Koperasi yang sehat	40 koperasi	10 koperasi (25,00%)
7	Fasilitasi sarana dan prasarana KUKM	Jumlah bantuan sarana dan prasarana KUKM yang diserahkan	25%	6 kelompok (120 orang) + 3 koperasi
8	Kualitas SDM pengelola / pelaku KUKM yang kompeten	Jumlah SDM pengelola/pelaku KUKM yang kompeten	50%	291 orang (jhl SDM KUKM yg mengikuti pembinaan/pelatihan)
9	Peningkatan pemasaran dan pengembangan produk KUKM	Ketersediaan data dan informasi produk KUKM	50%	Ketersediaan data dan informasi (50,00%)
10	Kualitas SDM aparatur Ketenagakerjaan dan KUKM yang kompeten	Jumlah SDM aparatur Ketenagakerjaan dan KUKM yang kompeten	70%	60% (dari jhl SDM aparatur dikategorikan kompeten)

b. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2018

Analisis capaian kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Padang Lawas Utara berdasarkan indikator kinerja adalah sebagai berikut :

## **1. Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja**

1.1. Sampai dengan akhir tahun 2018 **UPTD BLK** di Kabupaten Padang Lawas Utara belum ada, baik lembaganya, aparaturnya, sarana prasarana pendukung, maupun gedungnya. Tahun 2017 naskah akademik usulan pembentukan UPTD BLK telah disampaikan ke Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara untuk dievaluasi dan dipertimbangkan kelayakannya.

1.2. **Jumlah pencari kerja yang dilatih** melalui kegiatan pelatihan dengan sumber dana APBD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2018 adalah :

- Pelatihan Berbasis Kompetensi Basic Office dengan jumlah peserta 20 orang dan anggaran sebesar Rp. 99.210.000,- dan terealisasi Rp. 98.734.000,- (99,52%).
- Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan, yaitu pelatihan salon dan tata rias di Desa Binaan (Desa Paran Gadung Kec. Padang Bolak Julu). Peserta 20 orang anak remaja. Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 23.010.000,- dan terealisasi Rp. 22.720.000,- (98,74%).

## **2. Penempatan Tenaga Kerja**

### **1.1. Jumlah pencari kerja yang terdaftar**

Pelayanan pendaftaran pencari kerja dilaksanakan setiap hari kerja tanpa dipungut biaya apapun di Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM Kabupaten Padang Lawas Utara. Selama tahun 2018 pencari kerja yang terdaftar sebanyak 206 orang dari target 250 orang (realisasi 82,40%). Dalam upaya meningkatkan jumlah pencari kerja yang mendaftar, kegiatan yang dilaksanakan adalah Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja yang dilaksanakan di 4 lokasi (kecamatan), yaitu Kec. Hulu Sihapas, Kec. Padang Bolak Julu, Kec. Padang Bolak, dan Kec. Portibi dengan jumlah peserta sebanyak 200 orang.

Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 67.828.000,- dan terealisasi Rp. 67.828.000,0 (100,00%).

## **1.2. Jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan**

Dari 206 orang pencari kerja yang mendaftar, hanya 16 orang (7,77%) yang melapor telah ditempatkan (TKI di Malaysia), sedangkan sisanya sebanyak 190 orang tidak melapor.

## **3. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial**

### **- Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)**

Jumlah perselisihan hubungan industrial yang menyampaikan pengaduan dan telah diselesaikan dengan mediasi tanpa mengabaikan peraturan yang berlaku sebanyak 4 kasus dari target sebanyak 10 kasus. Dari jumlah pengaduan yang diterima membuktikan bahwa suasana perburuhan di Kabupaten Padang Lawas Utara cukup kondusif.

Untuk lebih meningkatkan pengetahuan pengusaha selaku pemberi kerja dan buruh selaku pekerja, perlu diadakan kegiatan sosialisasi berbagai peraturan tentang ketenagakerjaan termasuk prosedur dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

## **4. Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan**

### **4.1. Penetapan Upah Minimum Kabupaten Padang Lawas Utara**

Penetapan Upah Minimum Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan kewajiban daerah sesuai dengan PP Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, ataupun peraturan-peraturan sebelumnya. Kegiatan ini dilaksanakan di aula Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM Kabupaten Padang Lawas Utara pada tanggal 08 Nopember 2018 yang antara lain dihadiri oleh Asisten I, Kepala Bappeda, Kadis Naker dan KUKM, Komisi C DPRD, Dewan Pengupahan Daerah, Kabag Hukum, Kabag Ekbang, BPS, dan lain-lain. Setelah melalui pembahasan dan dengan mempertimbangkan semua instrument yang ada sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka DEPEDA memutuskan Upah Minimum Kabupaten (UMKab) Padang Lawas Utara Tahun 2019 sebesar Rp. 2.550.718,-.

UMKab. Padang Lawas Utara tersebut telah ditetapkan Gubernur Sumatera Utara dengan Surat Keputusan Nomor : 188.44/1453/KPTS/2018 tanggal 21 November 2018.

Untuk kegiatan ini anggaran yang tersedia sebesar Rp. 96.215.000,- dan terealisasi Rp. 96.149.300,- atau 99,93 %

#### **4.2. Jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta Program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan**

Kepesertaan pekerja/buruh dalam program BPJS mencapai angka 85% dari 85% yang ditargetkan (realisasi 100,00%).

Untuk meningkatkan kepesertaan tersebut, kegiatan yang dilaksanakan ialah Sosialisasi BPJS di 4 (empat) lokasi/perusahaan dengan peserta sebanyak 300 orang. Dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 57.264.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 57.264.000,- (100,00%)

#### **4.3. Jumlah Lembaga Ketenagakerjaan**

Jumlah Lembaga Ketenagakerjaan binaan Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM Kabupaten Padang Lawas Utara sebanyak 2 (dua), yaitu LKS Tenun dan Anyaman di Desa Singkat, dan LKS Jahit dan Bordir di Gunung Tua.

#### **5. Pembinaan warga eks Transmigrasi**

Selama tahun 2018 pembinaan yang dilaksanakan untuk warga eks transmigrasi di Kabupaten Padang Lawas Utara adalah Penyuluhan Koperasi dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang, dan kegiatannya akan diuraikan berikut.

#### **6. Penguatan Lembaga Koperasi**

Dalam rangka penguatan Lembaga Koperasi harus didukung dengan pembinaan, monitoring, pengawasan, dan evaluasi koperasi yang ada di Kabupaten Padang Lawas Utara sehingga terwujud koperasi-koperasi yang sehat, berkembang, maju, dan bermanfaat bagi anggotanya dan masyarakat sekitar.

Untuk mendukung terwujudnya hal tersebut, kegiatan yang dilaksanakan tahun 2018 adalah :

- Sosialisasi Prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian dengan peserta sebanyak 40 orang siswa SLTA dengan maksud agar pemahaman prinsip-prinsip perkoperasian dimulai sejak usia sekolah dengan harapan mereka akan menjadi penggerak koperasi di masa yang akan datang. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 19.280.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 17.454.000,- (90,53%).
- Peringatan Hari Koperasi berupa Lomba Tangkas Terampil (LTTK) bagi siswa SLTA se-Kabupaten Padang Lawas Utara, dan pelaksanaan Peringatan Hari Koperasi di Provinsi Sumatera Utara.  
Anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 73.945.000,- dan terealisasi Rp. 73.514.400,- (99,42%).
- Pengembangan Keanggotaan Koperasi melalui Peningkatan Penyuluhan Koperasi dalam rangka GAMASKOP. Kegiatan dilaksanakan di 3 (tiga) Desa Binaan dengan jumlah peserta masing-masing desa sebanyak 50 orang (3 desa = 150 orang) dan telah terbentuk koperasi yang mempunyai Badan Hukum di tiga desa tersebut, yaitu :
  - Desa Batu Pulut Kec. Batang Onang
  - Desa Paran Gadung Kec. Padang Bolak Julu
  - Desa Batang Pane I Kec. Halongonan Timur (Eks Transmigrasi)Anggaran yang ada untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 27.080.000,-- dan terealisasi Rp. 27.075.000,-- (99,98%).

## **7. Fasilitasi sarana dan prasarana KUKM**

Tahun 2018 pemberian bantuan/fasilitasi sarana dan prasarana bagi UMKM di Kabupaten Padang Lawas Utara yaitu melalui kegiatan :

- Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Untuk melaksanakan kegiatan ini diberikan bantuan berupa peralatan dan perlengkapan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, seperti alat-alat kosmetik, kursi plastic, kaca rias, dll.
- Pengembangan Keanggotaan Koperasi melalui Peningkatan Penyuluhan Koperasi dalam peningkatan GAMASKOP sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, diberikan bantuan berupa biaya pengurusan Akta Pendirian

Koperasi dan 1 buah meja serta 2 buah kursi plastic bagi masing-masing desa (3 desa).

- Penciptaan Wirausaha Baru Tenaga Kerja Mandiri (tugas pembantuan Kemenaker RI 4 paket, dan dana luncuran 1 paket) atau total 5 kelompok dan masing-masing kelompok terdiri dari 20 orang (5 kelompok = 100 orang). Peralatan yang diberikan sesuai dengan permintaan kelompok melalui proposal. Sebelum bantuan sarana dan prasarana diserahkan, terlebih dahulu dilaksanakan pembekalan dengan materi pokok motivasi dan akuntansi. Jumlah anggaran (APBN) kegiatan Tugas Pembantuan sebesar Rp. 454.150.000,- dan terealisasi Rp. 448.891.223,- (98,84%). Sedangkan dana luncuran sebesar Rp. 94.000.000,- dan terealisasi Rp. 93.991.445,- (99,99%).

#### **8. Kualitas SDM pengelola/pelaku KUKM**

Selama tahun 2018, kegiatan pembinaan bagi pengelola/pelaku KUKM dengan tujuan meningkatkan kualitas SDM-nya yang dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM Kabupaten Padang Lawas Utara, adalah :

- Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi UMKM dengan peserta sebanyak 80 orang. Anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 31.690.000,- dan terealisasi Rp. 31.960.000,- (100,00%)
- Penyelenggaraan pembinaan industry rumah tangga, industry kecil, dan industry menengah dengan jumlah peserta 60 orang. Anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 21.545.000,- dan terealisasi Rp. 21.545.000,- (100,00%).

Disamping itu, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara melaksanakan kegiatan pembinaan, pendidikan dan pelatihan, serta pemagangan baik yang dilaksanakan di Kabupaten Padang Lawas Utara, di Balai Latihan Koperasi (Balatkop) Medan, dan di sentra kerajinan di Jepara.

Kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Bimtek Pemeriksaan bagi Pembina Koperasi (Diskop UKM Provsu, jumlah peserta 36 orang)

- Bimtek Pengawasan Koperasi Syariah bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi (Diskop UKM Provsu, peserta 56 orang)
- Bimtek Laporan Evaluasi Kesehatan KSP/USP (Diskop UKM Provsu, jumlah peserta 50 orang)
- Pemagangan ke sentra tenun di Jepara, peserta 1 orang
- Pemagangan ke sentra kerajinan ukir kayu di Jepara, peserta 1 orang
- Dan lain-lain

### **9. Peningkatan pemasaran dan pengembangan produk KUKM**

Dalam rangka peningkatan pemasaran dan pengembangan produk KUKM Kabupaten Padang Lawas Utara, upaya yang dilaksanakan adalah penyusunan data base dan profil produk yang ada, serta melaksanakan promosi melalui kegiatan pameran.

Tahun 2018 pameran yang diikuti oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM Kabupaten Padang Lawas Utara adalah PRSU di Medan dengan anggaran sebesar Rp. 67.951.100,- dan terealisasi Rp. 67.951.100,- (100,00%).

Disamping itu untuk memaksimalkan data yang ada, dilaksanakan kegiatan Pendataan Koperasi dan UMKM se-Kabupaten Padang Lawas Utara, anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 56.666.400,- dan terealisasi Rp. 56.625.300,- (99,93%).

### **10. Kualitas SDM aparatur Pembina Ketenagakerjaan dan KUKM**

Dalam upaya pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengembangan, dan pemberdayaan Koperasi dan UKM di Kabupaten Padang Lawas Utara, perlu diikuti oleh kualitas SDM aparatur yang kompeten. Disadari sepenuhnya bahwa upaya peningkatan kualitas SDM aparatur masih sangat minim dilaksanakan, namun ke depan hal ini perlu direncanakan lebih matang sehingga tersedia aparatur Pembina yang kompeten di bidangnya.

Tahun 2018, tidak ada kegiatan untuk peningkatan kualitas SDM aparatur baik berupa Bimbingan Teknis ataupun pembinaan lainnya yang dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM Kabupaten Padang Lawas Utara. Akan tetapi ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten

Padang Lawas Utara, Dinas Ketenagakerjaan, dan juga Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara dan pada setiap kesempatan kegiatan-kegiatan tersebut diikuti oleh aparatur yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### 3.2 Realisasi Anggaran

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara alokasi dan realisasi anggaran menurut program dan kegiatan yang dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 3 : REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM KEGIATAN DINAS KETENAGAKERJAAN DAN KOPERASI UKM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2018

NO.	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kantor	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>750.157.239,-</b>	<b>724.684.448,-</b>	<b>96,60</b>	<b>25.472.791,-</b>
		1. Penyediaan jasa surat menyurat	4.509.000,-	4.509.000,-	100,00	0,-
		2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55.200.000,-	40.603.784,-	73,56	14.596.216,-
		3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Dpr.	1.133.000,-	1.133.000,-	100,00	0,-
		4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	9.976.500,-	9.938.500,-	99,62	38.000,-
		5. Penyediaan alat tulis kantor	43.934.200,-	43.132.900,-	98,18	801.300,-
		6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.240.000,-	25.240.000,-	100,00	0,-
		7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.660.000,-	8.481.500,-	97,94	178.500,-
		8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	3.120.000,-	3.120.000,-	100,00	0,-
		9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	24.000.000,-	24.000.000,-	100,00	0,-
		10. Penyediaan makanan & minuman	35.960.000,-	35.960.000,-	100,00	0,-
		11. Rapat-rapat koord dan konsultasi dalam daerah	25.259.639,-	16.940.000,-	67,06	8.319.639,-
		12. Rapat-rapat koord dan konsultasi ke luar daerah	189.284.900,-	188.345.764,-	99,50	939.136,-
13. Penyediaan jasa tenaga pendukung adm/teknis perkantoran	323.880.000,-	323.280.000	99,81	600.000,-		
2	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>153.770.000,-</b>	<b>86.409.108,-</b>	<b>99,81</b>	<b>290.892,-</b>
		1. Pengadaan meubelair	67.070.000,-	67.070.000,-	100,00	0,-
		2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	67.120.000,-	67.029.108,-	99,86	90.892,-
		3. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	19.580.000,-	19.380.000,-	98,98	200.000,-

3	Meningkatnya disiplin aparatur	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>36.250.000,-</b>	<b>36.250.000,-</b>	<b>100,00</b>	<b>0,-</b>
		1. Pengadaan mesin/kartu absensi	10.000.000,-	10.000.000,-	100,00	0,-
		2. Pengadaan pakaian dinas beserta Perlengkapannya	26.250.000,-	26.250.000,0	100,00	0,-
4	Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja	<b>Program Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja</b>	<b>99.210.000,-</b>	<b>98.734.000,-</b>	<b>99,52</b>	<b>476.000,-</b>
		Pelatihan berbasis kompetensi Basic Office	99.210.000,-	98.734.000,-	99,52	476.000,-
5	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	<b>Program Peningkatan Kesempatan Kerja</b>	<b>67.828.000,-</b>	<b>67.828.000,-</b>	<b>100,00</b>	<b>0,-</b>
		Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	67.828.000,-	67.828.000,	100,00	0,-
6	Meningkatnya pengetahuan pengusaha dan pekerja ttg hak dan kewajibannya	<b>Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</b>	<b>153.479.000,-</b>	<b>153.413.300,-</b>	<b>99,96</b>	<b>65.700,-</b>
		1. Penetapan UMKab	96.215.000,-	96.149.300,-	99,93	65.700,-
		2. Sosialisasi BPJS	57.264.000,-	57.264.000,-	100,00	0,-
7	Meningkatnya pengetahuan pelaku UMKM termasuk dalam membangun kemitraan usaha	<b>Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM</b>	<b>54.700.000,-</b>	<b>54.410.000,-</b>	<b>99,47</b>	<b>290.000,-</b>
		1. Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi UMKM	31.690.000,-	31.690.000,-	100,00	0,-
		2. Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	23.010.000,0	22.720.000,-	98,74	290.000,-
8	Meningkatnya pengetahuan pelaku UMKM dan meningkatnya jenis dan kualitas produk UMKM	<b>Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM</b>	<b>89.496.100,-</b>	<b>89.496.100,-</b>	<b>100,00</b>	<b>0,-</b>
		1. Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil, dan Industri Menengah	21.545.000,-	21.545.000,-	100,00	0,-
		2. Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM	67.951.100,-	67.951.100,-	100,00	0,-
9	Meningkatnya pengetahuan masy ttg koperasi dan meningkatnya jumlah koperasi yang sehat	<b>Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</b>	<b>149.891.400,-</b>	<b>147.593.700,-</b>	<b>98,47</b>	<b>2.297.700,-</b>
		1. Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	19.280.000,-	17.454.000,-	90,53	1.826.000,-
		2. Pendataan Koperasi dan UMKM	56.666.400,-	56.625.300,-	99,93	41.100,-
		3. Peringatan Hari Koperasi	73.945.000,-	73.514.400,-	99,42	430.600,-
10	Meningkatnya jumlah masyarakat sadar koperasi	<b>Prog Pemberdayaan Kop. dan UMKM</b>	<b>27.080.000,-</b>	<b>27.075.000,-</b>	<b>99,98</b>	<b>5.000,-</b>
		Pengembangan Keanggotaan Kop.melalui Peningk. Luh dlm rangka GAMASKOP	27.080.000,-	27.075.000,-	99,98	5.000,-
<b>JUMLAH (APBD)</b>			<b>1.581.861.739,-</b>	<b>1.552.963.656,-</b>	<b>98,17</b>	<b>28.898.083,-</b>
11	Meningkatnya jlh wirausaha baru TKM	<b>Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja</b>	<b>548.150.000,-</b>	<b>542.882.668,-</b>	<b>99,03</b>	<b>5.267.332</b>
		Wirausaha TKM melalui Pola Pendampingan (Tugas Pembantuan)	454.150.000,-	448.891.223,-	98,84	5.228.777,-
		Wirausaha TKM melalui Pola Pendampingan (Dana Luncuran)	94.000.000,-	93.991.445,-	99,99	8.555,-
<b>JUMLAH (APBN)</b>			<b>548.150.000,-</b>	<b>542.882.668,-</b>	<b>99,03</b>	<b>5.267.332,-</b>
<b>T O T A L (APBD + APBN)</b>			<b>2.130.011.739,-</b>	<b>2.095.846.324,-</b>	<b>98,40</b>	<b>34.165.415,-</b>

Dari table tersebut dapat dilihat bahwa capaian realisasi anggaran dirinci per program kegiatan (APBD + APBN) adalah sebesar Rp. 2.130.011.739,00 dari pagu anggaran sebesar Rp. 2.095.846.324,- atau 98,40%.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja (LK) Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2018 yang disusun ini merupakan wujud dukungan sistem administrasi yang diharapkan mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan

pelaksanaan tugas dan fungsi menjadi semakin profesional, efisien dan efektif serta tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan dinamika perubahan lingkungan strategis.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja dimaksudkan sebagai umpan balik (*feed back*) bagi manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan, antara lain adalah :

1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Padang Lawas Utara dapat dilaksanakan dengan memberdayakan sumber daya dan potensi yang ada.
2. Pelayanan aparatur maupun pelayanan public yang melekat pada tugas pokok dan fungsi juga tetap diupayakan pelaksanaannya sesuai peraturan yang berlaku.
3. Ukuran keberhasilan ataupun kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi diperoleh melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta diupayakan untuk dapat mencapai sasaran strategis yang ditetapkan secara maksimal.
4. Penetapan sasaran strategis tetap mengacu pada visi, misi dan tujuan sebagaimana yang tercantum dalam RENSTRA Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2013-2018.
5. Dalam hal adanya sasaran yang tidak tercapai sesuai target yang direncanakan, ini disebabkan beberapa kendala/masalah yang dihadapi. Kendala/masalah yang dihadapi terutama terletak pada keterbatasan-keterbatasan yang ada seperti pendanaan, aparatur, dan

sarana pendukung. Namun demikian kami bertekad pada tahun-tahun mendatang akan berupaya sedemikian rupa untuk mencapai target-target sasaran strategis yang dibuat dengan memanfaatkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin.

Semoga .....

Gunungtua, 21 Januari 2019.

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN DAN  
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

SITI AWAN, SH.,M.Si.  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19630109 198303 2 003